

**PENERAPAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG STABIL
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**



Penulisan Hukum
(Skrripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
BUNGA ASOKA ISWANDARI
NIM. E 0015086**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019**

Penulisan Hukum (Skripsi)

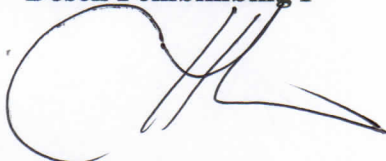
**PENERAPAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG STABIL
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Disusun Oleh
BUNGA ASOKA ISWANDARI
NIM. E0015086

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

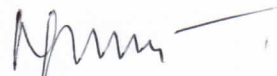
Surakarta, 9 April 2019

Dosen Pembimbing I



Dr. ISHARYANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 197805012003121002

Dosen Pembimbing II



Dr. AGUS RIWANTO, S.H., S.Ag., M.Ag
NIP. 197308042000121001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENERAPAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG STABIL
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**



Disusun Oleh :
Bunga Asoka Iswandari
NIM. E0015086

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada : Surakarta
Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2019

DEWAN PENGUJI

1. **Suranto, SH., M.H.**
NIP. 195608121986011001
Ketua

: 
: 

2. **Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag.** :
NIP. 197308042000121001
Sekretaris


Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Bunga Asoka Iswandari

NIM : E0015086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

**“PENERAPAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG STABIL
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945”**

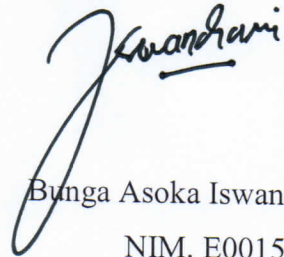
Adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)

dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 9 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



Bunga Asoka Iswandari

NIM. E0015086

ABSTRAK

Bunga Asoka Iswandari, E0015086. 2019. PENERAPAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG STABIL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan *Parliamentary Threshold* dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu ketentuan undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi dan bahan hukum sekunder yaitu, dokumen dan literatur hukum yang terkait dengan pembahasan antara *parliamentary threshold* dan sistem pemerintahan presidensial. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pelaksanaan sistem presidensial sebagaimana terjadi di Indonesia masih dalam keadaan yang belum stabil. Stabilitas pemerintahan ini dinilai dari apakah dalam realita menjalankan pemerintahan sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kenyataannya, dalam pelaksanaannya sistem pemerintahan Indonesia ini belum dapat dikatakan stabil karena antara eksekutif dan legislatif belum dapat bekerjasama dengan baik sesuai dengan kewenangannya. Faktor penyebab dari tidak harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif adalah karena perpecahan suara yang terlalu banyak di parlemen karena banyaknya partai politik yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan yang dapat berpengaruh dalam penyederhanaan partai politik yang akan berdampak terciptanya stabilitas pemerintahan. *Parliamentary threshold* menjadi salah satu jalan untuk menciptakan kondisi tersebut.

Kata Kunci: Sistem Presidensial; Stabilitas Pemerintahan; *Parliamentary Threshold*

ABSTRACT

Bunga Asoka Iswandari, E0015086. 2019. APPLICATION OF PARLIAMENTARY THRESHOLD IN THE ESTABLISHMENT OF PRESIDENTIAL GOVERNMENT THAT IS STABLE BY THE STATE BASIS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN 1945. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to examine the Application of the Treshold Parliamentary in the Establishment of Stable Presidential Government according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

This research is normative legal research, the types and sources of data used are secondary data consisting of primary legal materials, namely the provisions of the law, Constitutional Court decisions and secondary legal materials, namely documents and legal literature related to discussions between the parliamentary threshold and the government system presidential. The nature of the research used is descriptive research using statue approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach.

The presidential system implementation as happened in Indonesia is still in an unstable condition. The stability of this government is judged by whether the reality of running the government is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. But in reality, the implementation of the Indonesian government system has not been stable because the executive and legislative institutions have not been able to cooperate properly in accordance with its authority. The causal factor of the inharmonious relations between the executive and legislative institutions is that there are too many votes in parliament because of the many political parties that exist. Therefore a regulation is needed which can influence the simplification of political parties that will have an impact on the creation of government stability. Parliamentary threshold is one way to create these conditions.

Keywords: Presidential System; Government Stability; Parliamentary Threshold

MOTTO

“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya”
(Alexander Pope)

“Tidak ada hal yang sia-sia asalkan tetap berusaha, berdoa, dan bersabar”
(Penulis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas Berkah Rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Agung Iswanto dan Ibu Sri Purwanti Andari terima kasih atas segalanya yang selalu diberikan.
2. Kakak saya Nadya Iswandari terimakasih atas semangat yang diberikan.
3. Teman-Teman KSP Principium Fakultas Hukum UNS yang memacu semangat ku untuk terus memutar pikiran dalam mengolah permasalahan.
4. Teman-Teman KDFH yang membantu untuk terus belajar menjadi seorang presentator yang baik.
5. Teman-Teman TA KOMERSIL, Rahma, Erna, Intan, Ilmi, Syafril, Azizul dan Ihsan yang telah memberikan banyak pertolongan dan cerita selama masa perkuliahan
6. Kedua teman sepuhku Tessa Thamrin dan Mas Rizky Kurniyanto yang telah membantuku untuk tetap dapat bertahan di dunia kompetisi dan memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat serta Mbak Embun Nurani, Mas Andre, dan Mbak Ghena yang telah banyak membimbingku.
7. Teman-teman pemberkasan lomba Pascadiklat KSP “Principium” (Ayas dan Mas sulton), Diponegoro Law Fair 2015 (Tessa dan Melati), Padjajaran Law Fair 2016 (Tessa, Syafril, Mbak Nur, Mas Dwiky), Sciencesational UI 2016 (Mba Rege, Syafril, Tessa, Mas Rizky), Debat internal KDFH 2016 (Alfan dan Mira) Padjajaran Law Fair 2017 (Tessa, Syafril, Mas Rizky, Intan), Sciencesational UI 2017 (Syafril, Ifa, Erna, Naim), ACD MPR RI 2017 (Ihsan, Tessa, Ovin, Kahar, Intan), ACD MPR RI 2018 (Ihsan, Dela, Rahma, Resti).
8. Rekan-rekan panitia Seminar Nasional KSP Principium 2016
9. Rekan-rekan Pekan Hukum Nasional 2017!
10. Teman-teman SMA ku yang masih tetep menjadi teman baikku hingga sekarang yang tak putus memberi semangat dan dukungan selalu ada saat dibutuhkan Alvyann, Beby, Rheza, Feny, Dita, Manda dan Onki.
11. Rekan-rekan seperjuangan FH UNS ‘15

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT , Tuhan seluruh alam. Berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Penerapan *Parliamentary Threshold* dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan multipartai yang ekstrim menjadi sebuah kekhawatiran bagi jalannya pemerintahan presidensial Indonesia. Namun demikian, pengaturan tentang multipartai ini tidak dapat diatur semena-mena karena dapat mencederai prinsip demokrasi.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oleh karena itu ,dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang mendukung penulisan hukum ini.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Diah Apriani Atika Sari, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing perkuliahan selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
4. Bapak Suranto, S.H., M.H. selaku ketua bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan hukum skripsi yang telah memberikan waktu dan ide, bimbingan dan dukungan dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing penulis hukum skripsi juga yang telah memberikan waktu, masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
8. Bapak Agung Iswanto dan Ibu Sri Purwanti Andari selaku orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi dan memberikan support baik materil maupun formil sehingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
9. Teman-Teman Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan Ilmu, Keluarga Baru, dan semangat menjunjung tinggi profesionalitas dalam berfikir dan bekerja,
10. Teman-Teman TA KOMERSIL Rahma, Erna, Intan, Ilmi, Syafril, Azizul dan Ihsan yang telah memberikan tawa, canda beserta konflik selama masa perkuliahan dan berorganisasi, serta banyak ide dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini dan
11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 9 April 2019

Penulis

Bunga Asoka Iswandari

NIM.E0015071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum tentang Konstitusi.....	15
2. Tinjauan Umum tentang Demokrasi Perwakilan.....	19
3. Tinjauan Umum tentang Ambang Batas.....	30
4. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintahan	34
5. Tinjauan Umum tentang Stabilitas Pemerintahan	38
B. Kerangka Pemikiran.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Sistem Kepartaian dengan Sistem Presidensial	41
1. Sistem Kepartaian pada Indonesia.....	41
2. Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial	44
3. Sistem Kepartaian yang Ideal bagi Sistem Pemerintahan Presidensial.....	48
B. Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Membentuk Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	50
1. <i>Parliamentary Threshold</i> di Indonesia.....	50
a. Mekanisme Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i>	49
b. Efektivitas dari Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i>	62
2. Pembentukan Sistem Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i>	68
a. Sistem Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	68
b. Peran <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Membentuk Pemerintahan Presidensial yang Stabil.....	73
c. Dilema Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i>	76

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistem Kepartaian dari Masa ke Masa.....	42
Tabel 2. Data Perolehan Kursi Legislatif di Tingkat Provinsi Pada Pemilu 2014	52
Tabel 3. Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dan Perolehan Suaranya	62
Tabel 4. Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Perolehan Suaranya	64
Tabel 5. Partai Politik Peserta Pemilu 2019	65

